

KORUPSI KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA

Oleh: Tri Raharjanto

ABSTRACT

This study examines corruption in the perspective of regional heads direct election . Issues examined Is the electoral process directly affect the regional head of corruption and how corruption is done by the head of the region in the perspective of direct elections . The method used is quantitative method by using path analysis . The unit of analysis is the result of direct elections of regional heads , with a population of 528 regions. Samples were taken from 85 head area with simple random sampling technique . Research generates , First direct election process including the preparation , implementation and ratification and inauguration require large financing . Second , the process of direct elections showed a significant effect on the occurrence of corruption head area that includes bribery , extortion and nepotism .

Keywords: direct elections, the election process and corruption

PENDAHULUAN

Demokrasi dapat dipahami sebagai pelibatan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Makna lain dari demokrasi juga dapat dipahami sebagai meletakkan kekuasaan ditangan rakyat. Ihsan (2009: 66) mengatakan bahwa “kekuasaan diletakkan kepada rakyat mengandung berbagai konsekuensi bahwa kekuasaan ditentukan oleh rakyat melalui medium demokratisasi dalam wujud pemilihan presiden, wakil presiden atau kepala daerah langsung”. Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang selanjutnya disingkat Pilkada langsung dianggap sebagai bentuk perwujudan demokrasi. Pelibatan rakyat dalam memilih pemimpin

di daerah merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang harus dibayar mahal dengan banyaknya permasalahan korupsi yang dihadapi oleh kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pada bulan Juni 2005 merupakan pelaksanaan Pilkada langsung pertama kali di Indonesia. Pilkada langsung pada tahun 2005 ini telah dilaksanakan pada 213 daerah, yang terdiri dari 7 provinsi, 174 kabupaten dan 32 kota. Pilkada langsung ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Data Kementerian Dalam Negeri sampai dengan bulan April 2014, pelaksanaan Pilkada langsung telah dilaksanakan di 528 daerah sebanyak 1.026 kali. Banyaknya pelaksanaan Pilkada langsung, disebabkan karena bagi daerah

yang belum mendapatkan pasangan calon dengan perolehan suara lebih dari 30% perlu dilakukan putaran kedua. Pada setiap putaran, seringkali harus diikuti pemilihan suara ulang pada sebagian wilayah atau seluruh wilayah sebagai pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Fakta mencengangkan diperoleh dari Kemendagri bulan Desember 2013 yang telah merilis data menunjukkan bahwa sejak tahun 2005 s.d Desember 2013 di 528 daerah di Indonesia, sebanyak 319 orang kepala daerah (60,42%) mempunyai permasalahan hukum, dan sebanyak 283 orang kepala daerah (88,72%) diantaranya tersangkut masalah korupsi.

PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai-berikut ;

1. Apakah proses pilkada langsung berpengaruh terhadap terjadinya korupsi kepala daerah di Indonesia?
2. Bagaimanakah korupsi dilakukan kepala daerah dalam perspektif pilkada langsung?

FAKTA EMPIRIK KORUPSI KEPALA DAERAH

Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis. Dalam Kamus Ilmiah populer korupsi diartikan kecurangan, penyelewengan/penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan

sendiri dan pemalsuan. Kurniawan (22:2003) mengemukakan bahwa :

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari segi hukum, adalah:

- 1) Perbuatan melawan hukum;
- 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian;
- 5) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- 6) Penggelapan dalam jabatan;
- 7) Pemerasan dalam jabatan;
- 8) Ikut serta dalam pengadaan barang (bagi PNS/penyelenggara negara);
- 9) Menerima gratifikasi (bagi PNS/penyelenggara negara).

Kepala daerah yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dirilis Kemendagri 2014, sebagian besar merupakan hasil Pilkada langsung. Jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi sebanyak 283 orang kepala daerah (88,72%) dari total 319 orang kepala daerah yang tersangkut masalah hukum. Sedangkan sisanya, sebanyak 36 orang kepala daerah (11,28%) permasalahan hukum yang dihadapi bukan termasuk kasus korupsi. Status hukum dari sebagian besar kepala daerah telah berstatus sebagai tersangka dan terdakwa. Jumlah yang telah pernah berstatus tersangka sebanyak 243 orang kepala daerah (76,18%), sedangkan 76 orang kepala daerah (23,82%) lainnya masih dalam pemeriksaan sebagai saksi.

Kepala daerah yang tersangkut permasalahan hukum adalah kepala daerah hasil pilkada langsung yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2010. Kepala daerah hasil pilkada langsung tersangkut masalah hukum sebanyak 183 orang kepala daerah (57,37%). Sedangkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan di DPRD sebanyak 136 orang kepala daerah (42,63%). Permasalahan hukum kepala daerah hasil pemilihan DPRD sebagian besar terkait dengan korupsi yaitu sebanyak 127 orang kepala daerah (93,38%). Sedangkan sisanya, sebanyak 9 orang kepala daerah (6,62%), permasalahan hukum yang dihadapi bukan merupakan kasus korupsi. Permasalahan hukum kepala daerah hasil pemilihan langsung sebagian besar terkait dengan korupsi yaitu sebanyak 156 orang kepala daerah (85,25%). Sedangkan sisanya, sebanyak 27 orang kepala daerah (14,75%), permasalahan hukum yang dihadapi bukan merupakan kasus korupsi.

PROSES PILKADA LANGSUNG BERPENGARUH TERHADAP TERJADINYA KORUPSI KEPALA DAERAH

Untuk memperoleh gambaran proses pilkada langsung dilakukan survei dengan responden penelitian di 85 daerah yang terdiri dari 5 provinsi, 65 kabupaten dan 15 kota. Responden penelitian sebanyak 1360 orang pihak yang mengetahui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung dengan jumlah unit analisis yang diteliti sebanyak 85 daerah. Variabel proses pilkada langsung terdiri dari tiga subvariabel yaitu ; 1) subvariabel persiapan; 2) subvariabel pelaksanaan; dan

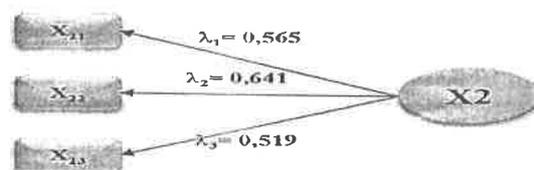
3) subvariabel pengesahan dan pelantikan. Seberapa besar kontribusi subvariabel Proses Pilkada Langsung (X2), dapat dilihat Tabel 1:

Tabel 1
Hasil Komponen Utama Subvariabel Proses Pilkada Langsung

Subvariabel	Komponen Utama		
	I	II	III
Persiapan (X2.1)	0.565	0.823	-0.062
Pelaksanaan (X2.2)	0.641	-0.485	-0.594
Pengesahan dan pelantikan (X2.3)	0.519	-0.296	0.802
Akar Ciri (Keragaman)	8.36	1.64	0.85
Keragaman Total (%)	77.04	15.14	7.82
Keragaman kumulatif (%)	77.04	92.18	100

Sumber: Data Penelitian Hasil Kuesioner 2015 (diolah)

Berdasarkan analisis komponen utama yang dilakukan terhadap subvariabel pelaksanaan, didapatkan hasil bahwa pada komponen utama pertama dapat menjelaskan 77,04 % variasi tiga subvariabel pembentuk Proses Pilkada Langsung. Ini berarti bahwa 77,04 % dari tiga subvariabel Proses Pilkada Langsung dapat terwakili dengan menggunakan komponen utama pertama.



Gambar 1.
Diagram Bobot Subvariabel Proses Pilkada Langsung (X2)

Nilai bobot yang diperoleh menjelaskan urutan variabel dari yang paling besar

kontribusinya. Hasil penghitungan bobot subvariabel Pelaksanaan (X2.2) diperoleh sebesar 0.641, bobot subvariabel Persiapan (X2.1) diperoleh sebesar 0.565, dan bobot subvariabel Pengesahan dan pelantikan (X2.3) diperoleh sebesar 0.519. Hasil Sikap Responden untuk 13 pernyataan kuesioner mengenai Proses Pilkada Langsung diuraikan pada penjelasan sebagai-berikut.

Subvariabel Persiapan

Persiapan merupakan salah satu subvariabel proses pilkada langsung. Yang dimaksud dengan subvariabel persiapan ini adalah sikap penyelenggara pilkada langsung yaitu ; komisioner atau anggota dan sekretariat KPUD, anggota dan sekretariat Banwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta seluruh penyelenggara sampai dengan tingkat TPS dalam mempersiapkan penyelenggaraan pilkada langsung.

Kontribusi subvariabel persiapan terhadap variabel proses pilkada langsung sebesar 0,565. Kontribusi tersebut menempati posisi kedua dibandingkan dengan subvariabel lain. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam pilkada langsung proses persiapan penyelenggara pilkada langsung telah tersosialisasi; memiliki dukungan pencalonan masing-masing; memiliki sumber dana; dan telah membentuk tim sukses.

Subvariabel persiapan pada variabel proses pilkada langsung diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang meliputi ; (1) sosialisasi; (2) dukungan pencalonan; (3) sumber dana; dan (4) pembentukan tim sukses. Uji validitas terhadap 4 (empat) item pernyataan pada subvariabel penerimaan berdasarkan

jawaban 30 orang responden, diperoleh hasil semua item memiliki nilai rhitung > 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item adalah valid. Nilai rhitung item sosialisasi sebesar 0.700; nilai rhitung item dukungan pencalonan sebesar 0.517; nilai rhitung item sumber dana sebesar 0.480; nilai rhitung item pembentukan tim sukses sebesar 0.466. Hasil sikap responden untuk setiap indikator diuraikan, sebagai berikut :

- (1) Pengukuran subvariabel persiapan berkaitan dengan proses pilkada langsung pada indikator sosialisasi pada subvariabel persiapan variabel proses pilkada langsung memperlihatkan responden menyatakan setuju 47,79 % dan sangat setuju 27,21 %, dengan demikian menunjukkan bahwa pilkada langsung memerlukan sosialisasi calon dengan biaya yang cukup besar;
- (2) Pengukuran subvariabel persiapan menggunakan indikator dukungan pencalonan dalam pilkada langsung. Sikap responden berkaitan dengan proses pilkada langsung pada indikator dukungan pencalonan memperlihatkan responden menyatakan setuju 47,65 % dan sangat setuju 18,16 %, dengan demikian bahwa pecalonan kepala daerah memerlukan dukungan partai politik dan masyarakat dengan biaya yang cukup besar;
- (3) Pengukuran subvariabel persiapan menggunakan indikator sumber dana. Sikap responden berkaitan dengan proses pilkada langsung pada indikator sumber dana memperlihatkan responden menyatakan ragu-ragu 40,37%, setuju 30,29% dan sangat setuju 14,19%, dengan demikian

pencalonan kepala daerah memerlukan donator dari berbagai sumber;

- (4) Pengukuran subvariabel persiapan menggunakan indikator pembentukan tim sukses. Sikap responden berkaitan dengan proses pilkada langsung pada indikator pembentukan tim sukses memperlihatkan bahwa responden menyatakan setuju 47,43% dan sangat setuju 23,16%, dengan demikian pembentukan tim sukses dalam pilkada langsung memerlukan pembiayaan yang cukup besar.

Subvariabel Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan salah satu subvariabel proses pilkada langsung. Yang dimaksud dengan subvariabel pelaksanaan ini adalah sikap penyelenggara pemilu yaitu komisioner atau anggota dan sekretariat KPUD, anggota dan sekretariat Banwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta seluruh penyelenggara sampai dengan tingkat TPS dalam mempersiapkan penyelenggaraan pilkada langsung.

Kontribusi subvariabel pelaksanaan terhadap variabel proses pilkada langsung sebesar 0,641. Kontribusi tersebut menempati posisi pertama dibandingkan dengan subvariabel lain. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam pilkada langsung proses pelaksanaannya membutuhkan pengadaan alat peraga; biaya pada pelaksanaan kampanye; biaya saksi; pembagian uang; dan biaya mobilisasi massa tim sukses.

Subvariabel pelaksanaan pada variabel proses pilkada langsung diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator yang meliputi ; (1) pengadaan alat peraga; (2) pelaksanaan kampanye; (3) biaya saksi; (4) pembagian uang; dan

(5) mobilisasi massa dan tim sukses. Uji validitas terhadap lima item pernyataan pada subvariabel pelaksanaan berdasarkan jawaban 30 orang responden, diperoleh hasil semua item memiliki nilai r hitung $> 0,30$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item adalah valid. Nilai r hitung item pengadaan alat peraga sebesar 0.685; nilai r hitung item pelaksanaan kampanye sebesar 0.677; nilai r hitung item biaya saksi sebesar 0.452; nilai r hitung item pembagian uang sebesar 0.736; nilai r hitung item mobilisasi massa sebesar 0,777. Hasil sikap responden untuk setiap indikator dapat diuraikan, sebagai berikut:

- (1) Pengukuran subvariabel pelaksanaan menggunakan indikator pengadaan alat peraga pada pelaksanaan pilkada langsung. Sikap responden terkait proses pilkada langsung pada indikator pengadaan alat peraga pada subvariabel persiapan memperlihatkan responden menyatakan setuju 44,78% dan ragu-ragu 39,78%, dengan demikian dalam tahap sosialisasi penggunaan alat peraga pencalonan memerlukan dana yang cukup besar;
- (2) Pengukuran subvariabel pelaksanaan menggunakan indikator pelaksanaan kampanye. Sikap responden berkaitan dengan proses pilkada langsung pada indikator pelaksanaan kampanye pada subvariabel pelaksanaan variabel proses pilkada langsung memperlihatkan responden menyatakan ragu-ragu 40,07%, setuju 32,87% dan sangat setuju 14,49%, dengan demikian menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam pilkada langsung memerlukan biaya yang besar;

- (3) Pengukuran subvariabel pelaksanaan menggunakan indikator biaya saksi. Sikap responden berkaitan dengan proses pilkada langsung pada indikator biaya saksi pada subvariabel pelaksanaan variabel proses pilkada langsung memperlihatkan responden menyatakan setuju 46,99% dan sangat setuju 23,38%, dengan demikian menunjukkan bahwa penyediaan saksi pada setiap TPS dalam pilkada langsung diperlukan honor dari pasangan calon;
- (4) Pengukuran subvariabel pelaksanaan menggunakan indikator pembagian uang. Sikap responden berkaitan dengan proses pilkada langsung pada indikator pembagian uang pada subvariabel pelaksanaan variabel proses pilkada langsung memperlihatkan responden menyatakan ragu-ragu 48,38%, setuju 31,32% dan sangat setuju 6,91%, dengan demikian menunjukkan bahwa pemberian uang sering dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dalam mendongkrak suara pemilih dalam pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia;
- (5) Pengukuran subvariabel pelaksanaan menggunakan indikator mobilisasi massa. Sikap responden berkaitan dengan proses pilkada langsung pada indikator mobilisasi massa pada subvariabel pelaksanaan variabel proses pilkada langsung memperlihatkan responden menyatakan ragu-ragu 39,26%, setuju 32,72% dan sangat setuju 4,12%, dengan demikian menunjukkan bahwa mobilisasi massa dukungan dalam pilkada langsung memerlukan biaya yang mahal.

Subvariabel Pengesahan dan Pelantikan

Pengesahan dan pelantikan merupakan salah satu subvariabel proses pilkada langsung. Yang dimaksud dengan subvariabel pengesahan dan pelantikan ini adalah sikap penyelenggara pemilu yaitu komisioner atau anggota dan sekretariat KPUD, anggota dan sekretariat Banwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta seluruh penyelenggara sampai dengan tingkat TPS dalam mengesahkan dan pelantikan kepala daerah terpilih.

Kontribusi subvariabel pengesahan dan pelantikan terhadap variabel proses pilkada langsung sebesar 0,519. Kontribusi tersebut menempati posisi terakhir atau ketiga dibandingkan dengan subvariabel lain. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam pilkada langsung proses pengesahan dan pelantikan penyelenggara pilkada langsung tidak terdapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK); surat keputusan pengesahan telah diurus; pelantikan telah dilaksanakan; dan syukuran atas terpilihnya kepala daerah.

Subvariabel pengesahan dan pelantikan pada variabel proses pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang meliputi ; (1)gugatan di MK; (2) pengurusan SK pengesahan; (3) pelantikan; dan (4) syukuran. Uji validitas terhadap 4 (empat) item pernyataan pada subvariabel pengesahan dan pelantikan berdasarkan jawaban 30 orang responden, diperoleh hasil semua item memiliki nilai r hitung > 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item adalah valid. Nilai r hitung item gugatan di MK sebesar 0.810; nilai r hitung item pengurusan SK pengesahan

sebesar 0.538; nilai r hitung item pelantikan sebesar 0.784; nilai r hitung item syukuran sebesar 0.569. Hasil sikap responden untuk setiap indikator diuraikan sebagai berikut :

- (1) Pengukuran subvariabel pengesahan dan pelantikan dapat menggunakan indikator gugatan di MK. Sikap responden berkaitan dengan proses pilkada langsung pada indikator gugatan di MK pada subvariabel pengesahan dan pelantikan variabel proses pilkada langsung memperlihatkan responden menyatakan setuju 48,01% dan ragu-ragu 42,65%, dengan demikian menunjukkan bahwa gugatan ke MK memerlukan biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi untuk pengacara, saksi dan saksi ahli;
- (2) Pengukuran subvariabel pengesahan dan pelantikan menggunakan indikator pengurusan SK pengesahan. Sikap responden berkaitan dengan proses pilkada langsung pada indikator pengurusan SK pengesahan pada subvariabel pengesahan dan pelantikan variabel proses pilkada langsung memperlihatkan responden menyatakan sangat setuju 48,68 %, setuju 29,63 % dan ragu-ragu 13,46 %, dengan demikian menunjukkan bahwa penetapan pemenang dan pengusulan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai dari usulan KPUD sampai dengan terbitnya SK Menteri Dalam Negeri atau Presiden RI memerlukan biaya yang cukup besar;
- (3) Pengukuran subvariabel pengesahan dan pelantikan menggunakan indikator pelantikan dalam pelaksanaan

pilkada langsung. Sikap responden berkaitan dengan proses pilkada langsung pada indikator pelantikan pada subvariabel pengesahan dan pelantikan variabel proses pilkada langsung memperlihatkan responden menyatakan setuju 46,40 %, sangat setuju 26,54 % dan ragu-ragu 21,25 %, dengan demikian menunjukkan bahwa pelantikan kepala daerah memerlukan biaya dari pemerintah daerah dan dari pasangan calon terpilih;

- (4) Pengukuran subvariabel pengesahan dan pelantikan menggunakan indikator syukuran. Sikap responden berkaitan dengan proses pilkada langsung pada indikator syukuran pada subvariabel pengesahan dan pelantikan variabel proses pilkada langsung memperlihatkan responden menyatakan ragu-ragu 51,32% dan setuju 25,37%, dengan demikian menunjukkan bahwa syukuran dan pertemuan dengan seluruh tim sukses dan masyarakat pendukung setelah terpilih atau dilantik memerlukan biaya yang cukup besar.

KORUPSI KEPALA DAERAH TERKAIT PILKADA LANGSUNG

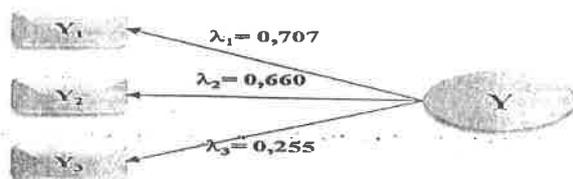
Gambaran korupsi kepala daerah terkait pilkada langsung dapat dianalisis dengan menggunakan variabel korupsi. Variabel korupsi kepala daerah terdiri dari 3 (tiga) subvariabel yaitu ; 1) subvariabel penyuapan (*bribery*); 2) subvariabel pemerasan (*extortion*); dan 3) subvariabel nepotisme (*nepotism*). Seberapa besar kontribusi variabel korupsi kepala daerah (Y) dapat dilihat Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Komponen Utama Subvariabel Korupsi
Kepala Daerah (Y)

Subvariabel	Komponen Utama		
	I	II	III
Penyuapan (<i>bribery</i>) (Y1)	0.707	-0.518	-0.481
Pemerasan (<i>extortion</i>) (Y2)	0.660	0.238	0.713
Nepotisme (<i>nepotism</i>) (Y3)	0.255	0.821	-0.511
Akar Ciri (Keragaman)	8.36	0.72	0.44
Keragaman Total (%)	88.1	7.42	4.47
Keragaman kumulatif (%)	88.1	95.53	100

Sumber: Data Hasil Penelitian 2015 (diolah)

Penghitungan Principal Component Analysis dilakukan menggunakan software Prelis-Lisrel. Hasil bobot setiap subvariabel Korupsi kepala daerah (Y) ditunjukkan oleh nilai loading pada 3 (tiga) buah komponen utama (seperti pada Tabel 2). Berdasarkan analisis komponen utama yang dilakukan terhadap subvariabel korupsi kepala daerah (Y), didapatkan hasil bahwa pada komponen utama pertama dapat menjelaskan 88,10% variasi 3 (tiga) subvariabel korupsi kepala daerah (Y). Ini berarti bahwa 88,10% dari 3 (tiga) subvariabel pembentuk variabel korupsi kepala daerah dapat terwakili dengan menggunakan komponen utama pertama.



Gambar 2
Diagram Bobot Variabel Korupsi Kepala
Daerah (Y)

Nilai bobot yang diperoleh menjelaskan urutan variabel dari yang paling besar kontribusinya. Hasil penghitungan bobot subvariabel Penyuapan (*bribery*) (Y1) diperoleh sebesar 0.707, bobot subvariabel Pemerasan (*extortion*) (Y2) diperoleh sebesar 0.660, dan bobot subvariabel Nepotisme (*nepotism*) (Y3) diperoleh sebesar 0.255. Hasil Sikap Responden untuk 19 butir pernyataan kuesioner mengenai korupsi kepala daerah diuraikan sebagai berikut :

1) Subvariabel Penyuapan (*bribery*)

Penyuapan merupakan salah satu subvariabel kualitas pilkada langsung. Kontribusi subvariabel penyuapan terhadap variabel kualitas pilkada langsung sebesar 0,707. Kontribusi tersebut menempati posisi pertama dibandingkan dengan subvariabel lain. Hasil ini menunjukkan bahwa kepala daerah hasil pilkada langsung sering menerima atau memberikan janji; hadiah; cinderamata; fasilitas; dan liburan.

Subvariabel penyuapan pada variabel korupsi kepala daerah diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator yang meliputi ; (1) pemberian janji; (2) hadiah; (3) cinderamata; (4) fasilitas; dan (5) liburan. Uji validitas terhadap 5 (lima) item pernyataan pada subvariabel penyuapan berdasarkan jawaban 30 orang responden, diperoleh hasil semua item memiliki nilai rhitung $> 0,30$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item adalah valid. Nilai rhitung item pemberian janji sebesar 0.663; nilai rhitung item pemberian hadiah 0.492; nilai rhitung item pemberian cinderamata sebesar 0.650; nilai rhitung item pemberian fasilitas sebesar 0.479; nilai rhitung item liburan sebesar 0,602.

Hasil sikap responden untuk setiap indikator diuraikan sebagai berikut :

- (1) Pengukuran subvariabel penyuaapan menggunakan indikator pemberian janji. Sikap responden berkaitan dengan korupsi kepala daerah hasil pilkada langsung pada indikator pemberian janji memperlihatkan responden menyatakan setuju 51,54 %, sangat setuju 20,81 % dan ragu-ragu 15,44 %, dengan demikian menunjukkan bahwa kepala daerah hasil pilkada langsung sering menerima pemberian atau janji dari pejabat, pengusaha dan masyarakat;
- (2) Pengukuran subvariabel penyuaapan menggunakan indikator pemberian hadiah. Sikap responden berkaitan dengan korupsi kepala daerah pada indikator pemberian hadiah memperlihatkan responden menyatakan sangat setuju 46,18% dan setuju 36,99%, dengan demikian bahwa kepala daerah sering menerima hadiah dari pejabat, pengusaha dan masyarakat;
- (3) Pengukuran subvariabel penyuaapan menggunakan indikator pemberian cinderamata. Sikap responden berkaitan dengan korupsi kepala daerah pada indikator pemberian cinderamata memperlihatkan responden menyatakan ragu-ragu 62,57 %, setuju 19,12 % dan sangat setuju 14,04 % dengan demikian menunjukkan bahwa kepala daerah sering menerima cinderamata dari pejabat, pengusaha atau swasta;
- (4) Pengukuran subvariabel penyuaapan menggunakan indikator pemberian fasilitas. Sikap responden berkaitan dengan korupsi kepala daerah

pada indikator pemberian fasilitas memperlihatkan responden menyatakan setuju 47,57%, ragu-ragu 21,54% dan sangat setuju 19,56%, dengan demikian menunjukkan bahwa kepala daerah sering menerima fasilitas dari pejabat, pengusaha atau swasta;

- (5) Pengukuran subvariabel penyuaapan menggunakan indikator liburan. Sikap responden berkaitan dengan korupsi kepala daerah pada indikator liburan memperlihatkan responden menyatakan ragu-ragu 40,22%, setuju 37,35% dan sangat setuju 13,38%, dengan demikian menunjukkan bahwa kepala daerah sering menerima fasilitas liburan dari pejabat, pengusaha atau swasta.

2) Subvariabel Pemerasan (*extortion*)

Pemerasan merupakan salah satu subvariabel korupsi kepala daerah. Kontribusi subvariabel pemerasan terhadap variabel korupsi kepala daerah sebesar 0,660. Kontribusi tersebut menempati posisi kedua dibandingkan dengan subvariabel lain. Hasil ini menunjukkan bahwa kepala daerah hasil pilkada langsung sering menyalahgunakan wewenang; memperkaya diri sendiri; memperkaya orang lain; dan melakukan penggelapan dana APBD.

Subvariabel pemerasan pada variabel korupsi kepala daerah dari hasil pilkada langsung diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang meliputi ; (1) penyalahgunaan wewenang; (2) memperkaya diri sendiri; (3) memperkaya orang lain; dan (4) penggelapan. Uji validitas terhadap 4 (empat) item pernyataan

pada subvariabel penerimaan berdasarkan jawaban 30 orang responden, diperoleh hasil semua item memiliki nilai rhitung $> 0,30$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item adalah valid. Nilai rhitung item penyalahgunaan wewenang sebesar 0.543; nilai rhitung item memperkaya diri sendiri sebesar 0.492; nilai rhitung item memperkaya orang lain sebesar 0.603; nilai rhitung item penggelapan sebesar 0.376. Hasil sikap responden untuk setiap indikator diuraikan sebagai berikut :

- (1) Pengukuran subvariabel pemerasan dalam variabel korupsi kepala daerah hasil pilkada langsung yang diukur dengan indikator penyalahgunaan wewenang. Hasil sikap responden berkaitan dengan korupsi kepala daerah hasil pelaksanaan pilkada langsung pada indikator :
 - a. Penyalahgunaan wewenang menjadi penentu memenangkan proyek/tender memperlihatkan responden menyatakan setuju 52,57 %, dengan demikian menunjukkan bahwa kepala daerah hasil pilkada langsung sering menyalahgunakan kewenangan menjadi penentu pemenang proyek/tender;
 - b. Penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan dana APBD untuk kegiatan sosialisasi dan kampanye secara terselubung memperlihatkan responden menyatakan setuju 56,62%, dengan demikian kepala daerah petahana sering menggunakan dana APBD untuk kegiatan sosialisasi dan kampanye secara terselubung;

- c. Penyalahgunaan wewenang dana hibah dan bantuan sosial yang sering diberikan kepada keluarga atau kerabat dan tim sukses-kepala daerah memperlihatkan responden menyatakan setuju 69,71%, dengan demikian menunjukkan bahwa kepala daerah hasil pilkada langsung menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang sering diberikan kepada keluarga atau kerabat dan tim sukses kepala daerah.

- (2) Pengukuran subvariabel pemerasan dalam variabel korupsi kepala daerah hasil pilkada langsung yang diukur dengan menggunakan indikator memperkaya diri sendiri Hasil sikap responden berkaitan dengan korupsi kepala daerah hasil pelaksanaan pilkada langsung pada indikator :
 - a. Memperkaya diri sendiri dengan menerima fee dari pemenang tender atau proyek pemerintah daerah memperlihatkan responden menyatakan sangat setuju 32,94%, ragu-ragu 29,71% dan setuju 20,51%, dengan demikian diperoleh bahwa kepala daerah hasil pilkada langsung memperkaya diri sendiri dengan sering menerima *fee* dari pemenang tender atau proyek pemerintah daerah;
 - b. Memperkaya diri sendiri dengan sering menerima uang, sumbangan dan bantuan dari pejabat di daerahnya memperlihatkan responden menyatakan setuju 48,90 %, ragu-ragu 32,21 % dan sangat setuju 11,10 %, dengan demikian menunjukkan bahwa kepala

daerah memperkaya diri sendiri dengan sering menerima uang, sumbangan dan bantuan dari pejabat di daerahnya;

- (3) Pengukuran subvariabel pemerasan dalam variabel korupsi kepala daerah hasil pilkada langsung yang diukur dengan menggunakan indikator memperkaya orang lain dengan memberikan hadiah kepada pihak lain yang bersumber dari APBD, perusahaan dan pihak ketiga. Hasil sikap responden memperlihatkan responden menyatakan setuju 52,06%, dengan demikian kepala daerah memperkaya orang lain dengan memberikan hadiah kepada pihak lain yang bersumber dari APBD, perusahaan dan pihak ketiga;
- (4) Pengukuran subvariabel pemerasan menggunakan indikator penggelapan. Sikap responden berkaitan dengan korupsi kepala daerah pada indikator penggelapan dengan tidak mengembalikan dana pinjaman dari APBD atau pihak lain memperlihatkan responden menyatakan setuju sebesar 56,32%, dengan demikian menunjukkan bahwa kepala daerah sering tidak mengembalikan dana pinjaman dari APBD atau pihak lain.

3) Subvariabel Nepotisme (*Nepotism*)

Nepotisme merupakan salah satu subvariabel korupsi kepala daerah. Kontribusi subvariabel nepotisme terhadap variabel korupsi kepala daerah sebesar 0,660. Kontribusi tersebut menempati posisi kedua dibandingkan dengan subvariabel lain. Hasil ini menunjukkan bahwa kepala daerah hasil pilkada langsung melakukan nepotisme dalam penerimaan pegawai; pengangkatan

dalam jabatan PNS di daerah; menentukan pemenang tender; dan pemberian izin yang dipengaruhi oleh faktor kedekatan, kekerabatan, kekeluargaan, dan dukungan kepentingan politik.

Subvariabel nepotisme pada variabel korupsi kepala daerah hasil pilkada langsung diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang meliputi ; (1) penerimaan pegawai; (2) pengangkatan dalam jabatan; (3) pemenang tender; dan (4) pemberian izin. Uji validitas terhadap 4 (empat) item pernyataan tersebut berdasarkan jawaban 30 orang responden, diperoleh hasil semua item memiliki nilai r hitung > 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item adalah valid. Nilai r hitung item penerimaan pegawai menerima sebesar 0.570; nilai r hitung item pengangkatan dalam jabatan sebesar 0.516; nilai r hitung item pemenang tender sebesar 0.742; nilai r hitung item pemberian izin sebesar 0.790. Hasil sikap responden untuk setiap indikator diuraikan sebagai berikut :

- (1) Pengukuran subvariabel nepotisme menggunakan indikator penerimaan pegawai. Sikap responden berkaitan korupsi kepala daerah pada indikator :
- a. Penerimaan pegawai dengan merekrut PNS banyak yang berasal dari keluarga atau kerabat kepala daerah/wakil kepala daerah memperlihatkan responden menyatakan setuju 60,74%, dengan demikian menunjukkan bahwa rekrutmen PNS banyak yang berasal dari keluarga atau kerabat kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - b. Penerimaan pegawai tenaga kontrak adalah keluarga atau kerabat kepala daerah/wakil kepala daerah memperlihatkan

- responden menyatakan setuju 58,68%, dengan demikian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kontrak adalah keluarga atau kerabat kepala daerah/wakil kepala daerah;
- (2) Pengukuran subvariabel nepotisme menggunakan indikator pengangkatan dalam jabatan. Sikap responden berkaitan korupsi kepala daerah pada indikator
- a. Pengangkatan dalam jabatan di daerah banyak berasal dari keluarga atau kerabat kepala daerah/wakil kepala daerah memperlihatkan responden menyatakan setuju 48,68 % dan sangat setuju 23,68 %, dengan demikian menunjukkan bahwa pengangkatan pejabat di daerah banyak berasal dari keluarga atau kerabat kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - b. Pengangkatan dalam jabatan tim sukses mendapati posisi strategis dalam struktur pemerintahan dan ikut menentukan posisi pejabat di daerah memperlihatkan responden menyatakan setuju 55,81%, dengan demikian menunjukkan bahwa tim sukses mendapati posisi strategis dalam struktur pemerintahan dan ikut menentukan posisi pejabat di daerah;
- (3) Pengukuran subvariabel nepotisme menggunakan pemenang tender. Sikap responden berkaitan dengan korupsi kepala daerah pada indikator :
- a. pemenang tender dengan keluarga atau kerabat kepala daerah sering ikut mengerjakan proyek pemerintah daerah memperlihatkan responden menyatakan setuju 40,15% dan sangat setuju 11,10%, dengan demikian menunjukkan bahwa keluarga atau kerabat kepala daerah sering ikut mengerjakan proyek pemerintah daerah;
 - b. Pemenangan tender dengan tim sukses banyak mendapatkan pekerjaan dan ikut menentukan proyek atau tender pemerintah daerah memperlihatkan responden menyatakan setuju 52,87%, dengan demikian menunjukkan bahwa tim sukses banyak mendapatkan pekerjaan dan ikut menentukan proyek atau tender pemerintah daerah.
- (4) pengukuran subvariabel nepotisme menggunakan indikator pemberian izin. Sikap responden berkaitan dengan korupsi kepala daerah pada indikator pemberian izin atau izin tertentu seringkali didasarkan kedekatan, kekerabatan atau ditentukan oleh tim sukses memperlihatkan responden menyatakan ragu-ragu 39,49 %, setuju 28,75% dan sangat setuju 10,59%, dengan demikian menunjukkan bahwa pemberian izin usaha atau izin tertentu seringkali didasarkan kedekatan, kekerabatan atau ditentukan oleh tim sukses.

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Proses pilkada langsung berpengaruh terhadap terjadinya korupsi kepala daerah. Pengaruh korupsi kepala daerah terjadi pada persiapan,

pelaksanaan, serta pengesahan dan pelantikan yang memerlukan pembiayaan yang besar;

- 2) Proses pilkada langsung menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya korupsi kepala daerah berupa : (1) penyuapan, meliputi; pemberian janji, hadiah, cinderamata, fasilitas, dan liburan; (2) pemerasan meliputi; penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan penggelapan; (3) nepotisme meliputi; penerimaan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, pemenangan tender, dan pemberian izin.

Saran

- 1) Perlunya penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas dan proses Pilkada langsung yang baik, semakin baik kualitas dan proses pilkada langsung akan semakin rendah korupsi kepala daerah;
- 2) Kualitas dan proses pilkada yang baik dapat dilakukan dengan melakukan pilkada serentak dengan seluruh prosesnya dibiayai oleh negara dan atau mengurangi pelaksanaan pilkada langsung dengan membangun sistem karier dalam mengangkat pemimpin pemerintahan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. 1986. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI.
- B. C. Smith, *Decentralization The Territorial Dimension of the State*, Sidney: Reader in Public Administration University of Bath.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
- Cloke, Kenneth & Goldsmith, Joan. 1997. "The End of Management and the Rise of Organizational Democracy", Jossey Bass.
- Creswell, John W.. 1994. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, California: Sage Publications, Thousand Oaks.
- David Marsh & Gerry Stoker. 2011. *Theory And Methods in Political Science*. New York: Palgrave, MacMillan.
- Davis, Kingsley. 1958. *Human Society*, New York: The Macmillan Company
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 2013. *DKPP Outlook: Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014*. Jakarta: DKPP.
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif-Kualitatif*. Bandung: Indra Prahasta.
- Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Vitra Aditya Bakti.
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gerungan. 1986. *Psikologi Sosial*, Bandung: PT. Eresco.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Utama.
- Hung-En Sung. 2004. *Democracy and political corruption: A Cross-National Comparison*. New York, USA: The National Center on Addiction and Substance Abuse, Columbia University.

- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, Algensindo.
- Kligaard, Robert. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- McMillan, James H., Schumacher, Sally. 2001. *Research in Education a Concept Introduction*. Fifth Edition, New York: Addison Wesley Longman, Inc.
- Ndraha, Taliziduhu. 1981a. *Research: Teori, Metodologi, Administrasi Jilid 1 dan 2*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- _____. 2005a. *Kybernology: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Praticia W. Ingraham, at all. 1994. *New Paradigms For Government, Issues For the Charging Public Service*. Sanfransisco California: Joosey Bass, Inc.
- Prithatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka
- Ramses, La Bakry & Andy. 2009. *Politik & Pemerintahan Indonesia*
- Robinson, Daron Acemoglu and James A.. 2012. *Why Nations Fall: The Origins Of Power, Prosperity, and Poverty*. USA: Crownpublishing.
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Mukti Media.
- Santoso, Ibnu. 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom, Gerakan Moral Memberantas Korupsi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Schein, Edgar H.. 2004. *Organizational Culture And Leadership*. 3rd Edition. San Fransisco, USA: Josey Bass, A Wiley Imprint.
- Serrakai, Francis. 2000. *Leadership And Politics In Asia*. New Delhi: Dominant Publishers and Distributors.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Stefan Krause and Fabio Méndez. 2007. *Corruption and Elections: An Empirical Study for a Cross-Section of Countries*. Department of Economics, Emory University, and Department of Economics, University of Arkansas.
- Suradinata, Ermaya. 1997. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan, Pendekatan Budaya, Moral, dan Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2012. *Strategic Leaders and Management Of Changes*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Torsten Persson. 2003. *Electoral Rules And Corruption*. Stockholm University Guido Tabellini Bocconi University Harvard University.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.